

## **ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini yaitu: peran majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari, hambatan dan kendala majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari dan upaya majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah di Kota Kendari. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris belum efektif, karena dalam hal pengawasan MPW tidak turun langsung karena sistem birokrasi yang mengatur MPD untuk bersentuhan langsung dengan notaris dan masyarakat namun MPW mengawasi kinerja dari MPD dalam melakukan tugasnya, MPW dalam hal ini harus selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum, agar dapat mengambil keputusan yang tepat tentang sanksi apa yang harus diberikan terhadap notaris bermasalah. Hambatan dan kendala majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari adalah ketidak sepahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Majelis Pengawas Notaris Wilayah antar unsur serta kesibukan setiap anggota baik pemerintahan, notaris, dan akademisi yang dapat membuat hambatan saat melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara teknis dan administratif yang kurang baik dalam pencatatan laporan masuk dari masyarakat sering terjadi, sehingga data mengenai notaris yang belum dan telah di proses dinyatakan hilang oleh pejabat yang bekerja diKantor Kementerian Hukum dan HAM yang juga salah satu anggota Majelis Pengawas Notaris, dan hanya tersisa 1 data yang masih ada tentang notaris yang telah di proses oleh Majelis Pengawas Notaris. Upaya majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari adalah Upaya hukum yang dilakukan akibat pemberian sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah.

**Kata Kunci : Peran, Majelis Pengawas Wilayah, Notaris, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hukum, Akta**

## ***ABSTRACT***

*The problems in this study are: the role of the notary's regional supervisory board in providing legal protection against notaries who violate laws against deeds made in Kendari City, obstacles and constraints of the notary's territory supervisory board in providing legal protection to notaries who violate the deed made in Kendari City and the efforts of the notary's regional supervisory board in providing legal protection against notaries who violate laws against deeds made in Kendari City.*

*The method used by researchers is a juridical sociological legal approach and the specifications in this study include analytical descriptive. There are sources and types of data in this study that are primary data obtained from field studies with interviews with the Head of the Regional Office of Kemenkumham in Kendari City. And secondary data is obtained from library studies.*

*Based on the results of the study that the role of the Notary Area Supervisory Board in providing legal protection to the notary has not been effective, because in terms of MPW supervision it did not come down directly because the bureaucratic system regulating the MPD was in direct contact with the notary public but MPW oversaw the performance of MPD in carrying out its duties, In this case MPW must always pay attention and see the relevance and urgency of a Notary being called as a witness or as a suspect with taking minuta or photocopies or letters attached to the minuta for judicial proceedings, investigations or public prosecutors, in order to be able to make the right decisions about what sanctions must be given to a troubled notary. The obstacles and constraints of the notary's regional supervisory board in providing legal protection to the notary who committed a violation of the deed made in Kendari City are disagreements about the duties and responsibilities of the Regional Notary Supervisory Board and the busyness of each member, including government, notary, and academics who can make obstacles when conducting technical and administrative checks and supervision that are not good in recording incoming reports from the community often occur, so that data about the notary that has not and has been processed is declared missing by officials working at the Office of the Ministry of Law and Human Rights who is also a member Notary Supervisory Board, and only 1 remaining data about the notary that has been processed by the Notary Supervisory Board. The efforts of the notary regional supervisory board in providing legal protection against the notary who violates the law against the deed made in Kendari City is a legal effort that is carried out due to the sanction of written warnings and written warnings by the Regional Supervisory Board.*

***Keywords : Role, Regional Supervisory Board, Notary, Legal Protection, Violation of Law, Deed***